



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS SOLEHUDIN
2. Jabatan : KETUA PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA PROGRAM SARJANA
3. NHK : 854266

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	4.250.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 291 m2/400 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/200 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 47 m2/57 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1.560 m2/156 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	197.500.000
1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA BLS/AT / NMAX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 42.500.000		
3. MOTOR, YAMAHA B3W-A/T / SOLO GEAR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	97.800.000
D. SURAT BERTAHAPAN	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	25.945.257
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.571.245.257



III. HUTANG

Rp. 130.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.441.245.257

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.